

Judul : Pemerintah kebut finalisasi RUU KKS
Tanggal : Sabtu, 06 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Penguatan Kedaulatan Digital

Pemerintah Kebut Finalisasi RUU KKS

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemko Polkam) menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Regulasi ini dinilai mendesak untuk menghadapi dinamika ancaman siber yang terus meningkat, sekaligus memastikan Indonesia tidak mudah didikte atau diintervensi oleh pihak luar maupun dalam.

"RUU KKS adalah kebutu-

han mendesak untuk memastikan ruang siber Indonesia aman, berdaulat dan mampu menghadapi eskalasi ancaman global," ujar Asisten Deputi Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Marsma TNI Budi Eko dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Kemko Polkam telah menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Pengawasan RUU KKS sebagai langkah strategis Pemerintah untuk mem-

perkuat landasan hukum keamanan siber nasional.

Rapat tersebut menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain BSSN, Kemenkomdigi, Kemenkum, TNI, dan Polri, guna merespons meningkatnya ancaman siber yang kian kompleks dan menasar infrastruktur digital strategis.

Pembahasan rapat difokuskan pada empat aspek utama, yakni perkembangan dan isu strategis RUU KKS, penajaman

substansi pengaturan terkait kelembagaan dan pembagian kewenangan.

Selain itu, harmonisasi dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Perpres Strategi Keamanan Siber, serta Perpres IIV dan penyusunan rekomendasi pengawalan yang komprehensif dan implementatif.

Eko menambahkan, pelaksanaan rapat ini merupakan bukti komitmen Kemko Pol-

kam menyelaraskan posisi seluruh kementerian/lembaga guna mempercepat finalisasi RUU KKS. Hasil pembahasan akan menjadi landasan strategis pemerintah dalam mengawal proses legislasi dan memastikan RUU tersebut mampu menjawab kebutuhan keamanan siber nasional secara menyeluruh.

"Keamanan siber adalah fondasi kedaulatan digital. Pemerintah harus bergerak cepat, terkoordinasi dan berpijak pada kepentingan nasional agar RUU

KKS dapat segera terwujud," tegasnya.

Terpisah, pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) King Faisal Sulaiman mengingatkan, percepatan pembahasan RUU KKS perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dan akademisi.

Menurutnya, keterlibatan publik penting agar undang-undang tersebut tidak berpotensi mengekang kebebasan digital. "RUU ini harus membuka

ruang partisipasi publik, supaya suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar. Jangan sampai undang-undang ini lahir tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kebebasan publik," ujarnya.

Faisal juga menekankan, arah kebijakan RUU KKS tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat sipil serta mengedepankan prinsip hak asasi manusia. ■ ASI